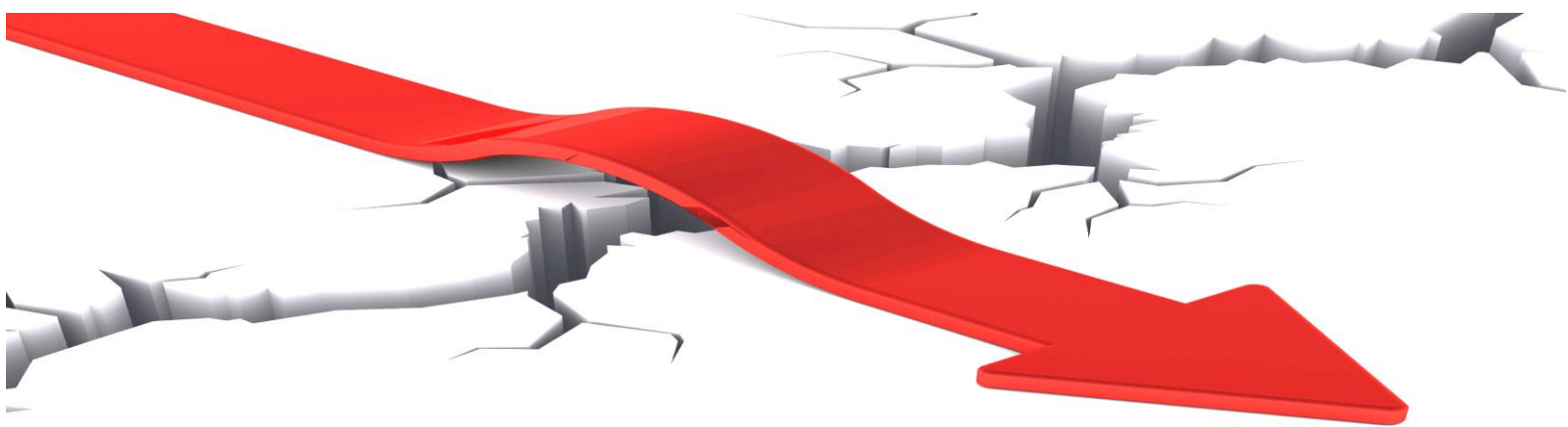




KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 050.13/24/VIII/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR 050.13/40/IX/2013 TENTANG PENILAIAN RISIKO
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 050.13/24/VIII/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH NOMOR 050.13/40/IX/2013 TENTANG PENILAIAN RISIKO
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kewenangan urusan dan struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta perubahan nomenklatur kegiatan maka dipandang perlu merubah penilaian risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/22/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/22/IX/2015, yakni pada lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 30 Agustus 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ttd.

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IVc
NIP. 19610801 198903 1 005

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 050.13/23/VIII/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH NOMOR 050.13/40/IX/2013 TENTANG PENILAIAN RISIKO
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PENILAIAN RISIKO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan:

1. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan RKPD
3. Penyusunan KUA dan PPAS
4. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
6. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi
7. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

IDENTIFIKASI TUJUAN (AWAL)

Unit Kerja : Bappeda Kulon Progo

Visi : -

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang Mendukung Tujuan/Sasaran
1	-	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Meningkatnya kinerja SKPD	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah2. Penyusunan RKPD3. Penyusunan KUA dan PPAS4. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah5. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten6. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi7. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

IDENTIFIKASI TUJUAN

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Tujuan		
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi
1.	<p>Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan</p> <p><i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah 2. Kegiatan Penyusunan RKPD 3. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS 4. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan
2.	<p>Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian</p> <p><i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 3. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi 	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

**KEGIATAN
PENYUSUNAN RKPD**

PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	BKAD	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim - Penyiapan jadwal kegiatan - Penyusunan petunjuk teknis musrenbang - Predikasi kemampuan keuangan daerah - Penyusunan pagu usulan wilayah dan pagu forum OPD - Pengumpulan aspirasi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan tim - Jadwal perencanaan tahunan - Petunjuk teknis musrenbang - pagu usulan musrenbang dan forum OPD - Rekapitulasi aspirasi DPRD 	PPTK	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim koordinasi • Data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • perumusan permasalahan pembangunan daerah • perumusan rancangan 	Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
		<p>kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah • perumusan program prioritas beserta pagu indikatif • Penyajian rancangan awal RKPD • Konsultasi publik 			
4.	Usulan rencana kegiatan pembangunan desa	Pelaksanaan musrenbang kecamatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, integrasi dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.	Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan Rencana pembangunan tingkat kecamatan (RPTK) hasil musrenbang kecamatan	Kepala Bappeda	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam konsultasi publik • Renstra OPD 	Penyusunan rancangan Renja OPD	Rancangan Renja OPD	Kepala OPD Kepala Bappeda	
6.	Rancangan renja OPD	Forum OPD membahas	Berita acara kesepakatan hasil	Kepala OPD	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
		rancangan Renja OPD	forum OPD kabupaten Penyempurnaan Renja OPD	Kepala Bappeda	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan awal RKPD Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD 	Verifikasi untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD	Rancangan RKPD	Bupati	
8.	Rancangan RKPD	penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD melalui Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang. Rancangan akhir RKPD	Bupati	
9.	Rancangan akhir RKPD	Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Bupati	
10.	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Renja OPD RKPD 	Penyempurnaan	Rancangan renja OPD yang disempurnakan		

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan informasi kemampuan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	BKAD belum menyampaikan informasi kemampuan keuangan	BKAD	Tidak dapat	Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan pagu usulan wilayah tidak sesuai jadwal	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	4 (Dapat diterima)	3
2.	Keterlambatan pengumpulan penjarangan aspirasi masyarakat melalui DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	DPRD tidak menyampaikan hasil penjarangan aspirasi sesuai jadwal	DPRD	Tidak dapat	Ketidaktepatan waktu masuknya aspirasi dari DPRD mengakibatkan kurang lengkapnya bahan untuk pembasan forum OPD	Bappeda	Sering (3)	Rendah (2)	6 (Diperlukan pengendalian yang cukup)	1
3.	Ketidaktepatan pemapuserasian usulan OPD, hasil	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala 	Perencana pengampu urusan	Tim koordinasi	Dapat	Ketidaktepatan pemapuserasian .	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	4 (Dapat	2

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
	musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Bappeda	tidak cermat			Ketidaktercermatan pembahasan usulan mengakibatkan kualitas keluaran RKPD kurang.	OPD			diterima)	
4.	Keterlambatan penyusunan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penetapan RKP • Keterlambatan penetapan RKPD DIY 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat • Bappeda DIY 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Dapat • Tidak Dapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penyusunan RKP oleh pusat dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan. • Keterlambatan penyusunan RKPD DIY oleh Bappeda DIY dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan. 	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkab Kulon Progo	Jarang (2)	Rendah (2)	4 (Dapat diterima)	4

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan informasi kemampuan keuangan	Peningkatan koordinasi	PPTK	1 bulan
2.	Keterlambatan pengumpulan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui DPRD	Peningkatan koordinasi	Kepala Bappeda	1 bulan
3.	Ketidaktepatan pepaduserasian usulan OPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Peningkatan komunikasi	Kepala-kepala Bidang	2 bulan
4.	Keterlambatan penyusunan RKPD	<ul style="list-style-type: none">• Penjadwalan• Peningkatan kinerja	Ketua Tim Penyusunan RKPD	2 bulan

**KEGIATAN
PENYUSUNAN KUA PPAS**

PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	BKAD	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukan tim - penyiapan jadwal kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - susunan tim - jadwal perencanaan tahunan 	PPTK	
3.	Tim koordinasi data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - permintaan data kemampuan keuangan daerah - permintaan materi KUA PPAS dan pra RKA - pembahasan kerangka regulasi penyusunan KUA dan PPAS - penjabaran tema RKP dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN - pejabaran tema RKPD DIY dan asumsi dalam penyusunan RKPD DIY 	<ul style="list-style-type: none"> - Data kemampuan keuangan daerah - Materi KUA dan PPAS dan pra RKA - Rekapitulasi Usulan KUA dan PPAS - Kebijakan ekonomi makro - Kebijakan Pendapatan - Kebijakan Belanja - Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RAPBD 	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan data ekonomi makro - data rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan 			
4.	Materi KUA dan PPAS dan pra RKA	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan - Pencermatan Usulan - Desk dengan OPD - Pembahasan Usulan dengan Tim Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Usulan setelah dilakukan desk dengan OPD - Rekapitulasi usulan setelah dilakukan pembahasan dengan tim teknis 	Kepala Bappeda	
5.	Rancangan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan KUA PPAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan 	Bupati	
		<ul style="list-style-type: none"> - Ekspose KUA dan PPAS ke Kepala Daerah/Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Kepala Daerah 	PPTK	
6.	Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi KUA dan PPAS ke Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Gubernur 	PPTK	
7.	Rancangan KUA PPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan Dokumen Rancangan KUA PPAS ke DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi KUA PPAS yang telah dibahas dengan DPRD 	PPTK	
		<ul style="list-style-type: none"> - pembahasan rancangan KUA PPAS 	<ul style="list-style-type: none"> - MOU Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD 	BKAD	

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan informasi keuangan	- PPTK - Kepala Bappeda	BKAD belum menyampaikan informasi kemampuan keuangan daerah	BKAD	Tidak dapat	Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan Pagu KUA PPAS tidak sesuai jadwal	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	2
2.	Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD	- PPTK - Kepala Bappeda	OPD terlambat menyampaikan usulan KUA PPAS	OPD	Tidak dapat	Jadwal penyusunan menjadi mundur	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	1
3.	Keterlambatan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD	- Pemerintah Daerah	Lamanya pembahasan dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif	DPRD	Dapat	Penandatanganan Nota kesepakatan tidak sesuai jadwal	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	3

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan informasi keuangan	Peningkatan koordinasi	PPTK	2 hari
2.	Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD	Peningkatan koordinasi	Kepala Bappeda	2 hari
3.	Keterlambatan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD	Peningkatan komunikasi dan negosiasi	Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah	1 minggu

KEGIATAN
PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	BKAD	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim - Penyiapan jadwal kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan tim - Jadwal perencanaan tahunan 	PPTK	
3.	Tim Pelaksana OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolah data kinerja dari unit kerja OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja fisik dan keuangan setiap bulan (Pelaksanaan kinerja APBD) - Laporan kinerja kegiatan dan Program setiap triwulan (Evaluasi Hasil Renja OPD) 	Kepala Bappeda	
4.	Tim Pelaksana Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi dan validasi data kinerja OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengendalian Pelaksanaan APBD - Laporan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan yang 	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
			valid		
5.	Materi Pelaporan Pengendalian Kinerja APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan - Pencermatan data kinerja kegiatan - Desk dengan OPD - Monitoring lokasi pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi permasalahan dan solusi kegiatan setelah dilakukan desk dengan OPD 	Kepala Bappeda	
6.	Materi Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan - Pencermatan data kinerja kegiatan dan program - Desk dengan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi faktor-faktor pendorong dan penghambat kinerja Urusan dan Sasaran Pemerintah daerah 	Kepala Bappeda	
7.	Penyampaian Pelaporan Evaluasi Renja OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan Dokumen Evaluasi Renja OPD setiap Triwulan kepada Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Renja OPD 	Kepala Bappeda	
8.	Penyampaian Pelaporan Evaluasi RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan Dokumen Evaluasi RKPD setiap Triwulan kepada Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi RKPD 	Bupati	

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan entry data kinerja OPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan dengan sistem informasi monev (emonev)	- PPTK - Kepala Bappeda	OPD tidak mematuhi waktu penyampaian pelaporan yang telah ditetapkan mulai tanggal 1 s.d 10 setiap bulan	OPD	Dapat dikendalikan	Informasi kinerja kurang valid	OPD Bappeda	Jarang (2)	Rendah Sekali (1)	Dapat diterima (2)	2
2.	Kurang akurasi data kinerja kegiatan dan program	- PPTK - Kepala Bappeda	Pengisian data yang tidak valid dan tidak sesuai dengan metadata yang ditetapkan	OPD	Tidak Dapat dikendalikan	Evaluasi kinerja OPD dan Pemerintah Daerah kurang valid	Pemerintah Daerah	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	1
3.	Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur	- Pemerintah Daerah	Penyampaian data kinerja kurang valid sehingga membutuhkan konfirmasi ulang dengan OPD	OPD Bappeda	Dapat	Penyampaian pelaporan tidak sesuai jadwal yang ditentukan	Pemerintah Daerah	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	3

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan entry data kinerja OPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan dengan sistem informasi monev (emonev)	Peningkatan koordinasi internal OPD	PPTK	5 hari
2.	Kurang akurasi data kinerja kegiatan dan program	Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi	Kepala Bappeda	2 hari
3.	Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur	Peningkatan komunikasi dan koordinasi	Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah	3 hari

KEGIATAN
PENYUSUNAN ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Kegiatan Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Kegiatan Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.				
2.				

KEGIATAN
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PERGURUAN TINGGI

PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	BKAD	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Kepala Bappeda	
3.	Permohonan Ijin menjadi lokasi KKN/KKL	Verifikasi kelengkapan persyaratan Permohonan dari Perguruan Tinggi	Ijin sebagai lokasi KKN/KKL	Sekretaris daerah	

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan yang kurang lengkap • Pejabat penandatanganan Ijin KKN/KKL tidak berada di tempat 	<ul style="list-style-type: none"> • PT • Pemkab KP 	Tidak dapat	Terlambatnya Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL.	PPTK	Jarang-sering (2)	Rendah sekali (1)	Dapat diterima (2)	1

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL	Ketelitian dalam verifikasi permohonan ijin KKN/KKL Peningkatan koordinasi dan komunikasi	PPTK	1 bulan

KEGIATAN
JARING PENELITIAN (JARLIT) TINGKAT KABUPATEN

PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	BKAD	
2.	SDM	Konsolidasi awal tahun	Sinkronisasi program kerja DRD dengan sekretariat DRD	Kepala Bappeda	
3.	DRD	Analisis permasalahan	Rekomendasi DRD	Kepala Bappeda	
4.	- Tim penyelenggara - Peserta lomba	Pelaksanaan penganugerahan IPTEK Kreanova	Inovasi di bidang iptek	Kepala Bappeda	

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

No	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Ketidaksolidan DRD dalam berkoordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bidang • Kepala Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketugasan setiap anggota DRD yang beragam • Intensitas rapat DRD rendah 	Anggota DRD	Tidak dapat dikendalikan	Tidak terbitnya rekomendasi sesuai dengan jadwal	<ul style="list-style-type: none"> • DRD • PPTK • Kepala Bappeda 	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	1
2.	Tidak terselenggaranya Penganugerahan IPTEK Kreanova	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bidang • Kepala Bappeda 	- Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba	Masyarakat Kulon Progo	Tidak dapat dikendalikan	Tidak adanya inovasi IPTEK di Kulon Progo	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda • masyarakat 	Jarang sekali (1)	Rendah (2)	Dapat diterima (2)	2

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Ketidaksolidan DRD dalam berkoordinasi	Menjalin komunikasi secara non formal dengan seluruh anggota DRD	PPTK	1 bulan
2.	Tidak terselenggaranya Penganugerahan IPTEK Kreanova	Pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif serta melakukan inovasi sosialisasi	PPTK	1 bulan

KEGIATAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD)

PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Program dan Kegiatan APBD Pengelolaan SIPD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	DPA	BKAD	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim Koordinasi	Kepala Bappeda	
3.	Data Sektoral/Data Primer/ Data Sekunder OPD	Pengumpulan, Klarifikasi, Penyusunan Data SIPD	Data Primer, Sekunder, dari OPD	Kepala Bappeda	
4.	Draft Data SIPD	Ekspose Data SIPD	Draft Buku SIPD	Kepala Bappeda	
5.	Draft Buku Data SIPD	Penyusunan Buku SIPD	Buku Data SIPD	Bupati	

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

No	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Tidak tersedianya data pada tahun N	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	Data Primer dari OPD belum terkumpul	OPD Sektoral	Tidak Dapat	Tersedianya data terlambat	OPD sumber data	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	1
2.	Keterlambatan Penyusunan Data SIPD	<ul style="list-style-type: none"> • PPTK • Kepala Bappeda 	Proses pengumpulan Data Primer dari OPD berjalan lambat	OPD Sektoral	Tidak Dapat	Akibat dari proses pengumpulan data primer yang terlambat mengakibatkan keterlambatan penyusunan data	Bappeda	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	2

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Tidak tersedianya data pada tahun ke-n	Perketat koordinasi dan penjadwalan	Kepala OPD Sumber Data	6 Bulan
2.	Keterlambatan Penyusunan Data SIPD	Perketat koordinasi dan penjadwalan	Anggota tim koordinasi	6 Bulan